

**IMPLEMENTASI PENGAMANAN DAN PENERTIBAN  
BARANG MILIK DAERAH BERDASARKAN  
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018**

**(Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah  
Provinsi Sumatera Selatan)**

**TESIS**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Magister Sains (M.Si.)  
Pada Program Studi Magister Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya**



**ARWIN NOVANSYAH  
07012622125081**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2024**

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arwin Novansyah  
NIM : 07012622125081  
Program Studi : Magister Administrasi Publik  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Sriwijaya dan/atau Program Studi Magister Administrasi Publik. **Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non exclusive Royalty - Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**“IMPLEMENTASI PENGAMANAN PENERTIBAN BARANG MILIK DAERAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018 (STUDI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN)”**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Sriwijaya dan/atau Program Studi Magister Administrasi Publik berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Palembang  
Pada Tanggal : September 2024  
Yang Menyatakan,



**Arwin Novansyah**  
NIM. 07012682125032

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arwin Novansyah  
NIM : 07012622125081  
Tempat / Tanggal lahir : Palembang, 06 Desember 1982  
Program Studi : Magister Administrasi Publik  
Bidang Kajian Utama : Kebijakan Publik  
Judul Tesis : IMPLEMENTASI PENGAMANAN PENERTIBAN BARANG MILIK DAERAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018 (STUDI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang, September 2024  
Yang Menyatakan,



**Arwin Novansyah**  
NIM. 07012622125081

## HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Tesis : IMPLEMENTASI PENGAMANAN PENERTIBAN  
BARANG MILIK DAERAH BERDASARKAN  
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018  
(STUDI PADA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH PEMERINTAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN)

Nama Mahasiswa : Arwin Novansyah  
NIM : 07012622125081  
Program Studi : Magister Administrasi Publik  
Bidang Kajian Utama : Kebijakan Publik  
Tanggal Ujian : 22 Juli 2024

NO.	NAMA DOSEN	TIM PENGUJI	TANDA TANGAN
1	Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si.	Ketua	
2	Dr. Andries Lianardo, M.Si.	Sekretaris	
3	Prof. Dr. Alfitri, M.Si.	Anggota	
4	Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.	Anggota	
5	Dr. Sena Putra Prabujaya, S.AP., M.AP	Anggota	


Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya



**Prof. Dr. Alfitri, M.Si.**  
NIP. 19660122 199003 1 004



Palembang, September 2024  
Menyetujui,  
Koordinator Program Studi  
Magister Administrasi Publik



**Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si.**  
NIP. 19780512 200212 1 003

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

“Tesis ini dipersembahkan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan, terkhusus kepada Program Magister Administrasi Publik, FISIP, Universitas Sriwijaya”

## HALAMAN PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : IMPLEMENTASI PENGAMANAN PENERTIBAN BARANG MILIK DAERAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018 (STUDI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN)

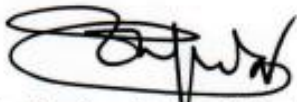
Nama Mahasiswa : **ARWIN NOVANSYAH**

NIM : 07012622125081

Program Studi : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

Bidang Kajian Utama : KEBIJAKAN PUBLIK

### Menyetujui,



**Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si.**  
Pembimbing Pertama



**Dr. Andries Lionardo, M.Si.**  
Pembimbing Kedua

### Mengetahui,

Koordinator Program Studi  
Magister Administrasi Publik



**Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si.**  
NIP. 19780512 200212 1 003

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya



**Prof. Dr. Alfitri, M.Si**  
NIP. 19660122 199003 1 004

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah syukur segala puji bagi Allah SWT atas segala karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan tesis yang berjudul “**Implementasi Pengamanan Dan Penertiban Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 ( Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan)**”. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang setulus tulusnya kepada Bapak **Dr. Raniasa Putra, M.Si** selaku pembimbing I dan Bapak **Dr. Andries Lionardo, M.Si** selaku pembimbing II, atas ketulusan dan keikhlasannya meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, dan saran kepada penulis dalam rangka menyelesaikan tesis ini dengan baik.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah berjasa sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini, kepada yang terhormat:

1. Bapak Ir. H. Mawardi Yahya Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Selatan (2018-2023) sekaligus sebagai mentor penulis.
2. Bapak Sekretaris Daerah, Bapak Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bapak Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Bapak Kepala Biro Umum dan Perlengkapan, Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKAD, Kasub bidang Perencanaan dan Pengawasan Barang Milik Daerah BPKAD, Kasub bidang Pemanfaatan Barang Milik Daerah BPKAD, Kasub bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah BPKAD, Kasubag Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan.
3. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Raniasa Putra, M.Si., selaku Koordinator Program Studi Magister Administrasi Publik Univeristas Sriwijaya sekaligus sebagai Pembimbing I penulis.

5. Bapak Dr. Andries Lionardo, M.Si sebagai Pembimbing 2 penulis dan Bapak Dr. Sena Putra Prabujaya, S.AP.,M.AP sebagai teman diskusi penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Magister Administrasi Publik Universitas Sriwijaya yang memberikan bimbingan, arahan dan nasihat bagi penulis sejak awal perkuliahan hingga penyelesaian tesis ini, dan juga Ibu Arie dan Mba Mareta selaku staf administrasi Program Studi MAP UNSRI yang telah banyak membantu kelancaran administrasi perkuliahan.
7. Ibuku tercinta dan (Alm) Ayahandaku tercinta yang dahulu telah mendidik ku hingga menjadi pribadi yang lebih baik sampai saat ini, Mama dan Papa tercinta dan seluruh kakak adik serta keluargaku tercinta, terima kasih untuk semua doanya dan dukungannya selama menjalani tugas belajar.
8. Istriku tercinta Pratiwi Lestari, dan anak-anakku tersayang Nafisah Aurelia Arwin, Farras Altamis Arwin dan Fariz Athaillah Arwin terima kasih untuk semua dukungan, doa, cinta dan kasih sayangnya.
9. Teman-teman pejabat dan pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan, Biro Umum dan Perlengkapan, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan serta semua jajaran Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan yang telah mendukung kami, terima kasih atas dukungan dan doanya.
10. Teman-teman mahasiswa MAP UNSRI 2020 atas kebersamaan, bantuan dan dukungan selama menjalani pendidikan ini.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih terdapat kelemahan dan kekurangan yang perlu diperbaiki dan dilengkapi, oleh karena itu dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan masukan, koreksi dan saran untuk memperbaiki dan melengkapi kelemahan dan kekurangan tersebut. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Palembang, Juli 2024

Penulis

Arwin Novansyah



## ABSTRAK

IMPLEMENTASI PENGAMANAN DAN PENERTIBAN BARANG MILIK DAERAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018 ( STUDI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN )

Karya tulis ilmiah berupa tesis, Juli 2024

Arwin Novansyah; dibimbing oleh Dr. Raniasa Putra, S.IP, M.Si dan Dr. Andries Lionardo, M.Si,

113 halaman, tabel, gambar, lampiran,

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti Implementasi Pengamanan dan Penertiban Barang Milik Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 (studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan). Teori yang digunakan adalah model Implementasi kebijakan Donal van Meter dan Carl van Horn yang terdiri dari enam variabel ; Standar dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Organisasi Pelaksana, Disposisi atau Sikap Para Pelaksana, Komunikasi Antar Organisasi, Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik. Metode penelitian yang digunakan ialah metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian yang dianalisis dengan kerangka berfikir dari Donal van Meter dan Carl van Horn menunjukkan bahwa dukungan sarana dan prasarana dasar operasional sudah terpenuhi, selain itu juga dukungan dari aparaturnya penegak hukum dalam pelaksanaan pengaman dan penertiban Barang Milik Daerah. Disisi lain beberapa hambatan yang ditimbulkan dalam pelaksanaan kebijakan Pengamanan dan Penertiban Barang Milik Daerah dipengaruhi banyak faktor, dukungan anggaran yang belum maksimal, lemahnya bukti kepemilikan sebagai akibat dari lemahnya sistem pengadministrasian dan dokumentasi, kurangnya rasa tanggung jawab dari sebagian kepala Organisasi Perangkat Daerah terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah, serta masih minimnya kesadaran masyarakat dan oknum mantan pejabat pengguna barang yang masih ingin menggunakan Barang Milik Daerah yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga menjadikan hambatan dalam implementasi Pengamanan dan Penertiban Barang Milik Daerah.

Menyetujui,

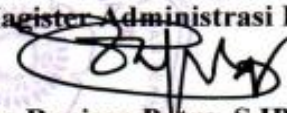


**Dr. Raniasa Putra, S.IP, M.Si**  
Pembimbing Pertama



**Dr. Andries Lionardo, M.Si**  
Pembimbing Kedua

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi  
Magister Administrasi Publik



**Dr. Raniasa Putra, S.IP, M.Si**  
197605122012 12 1 003

## ABSTRACT

*IMPLEMENTATION OF SECURITY AND REGIONAL PROPERTY REGIONAL PROPERTY REGARDING REGIONAL REGULATION NUMBER 2 OF 2018 (STUDY ON THE REGIONAL FINANCIAL AND ASSET MANAGEMENT AGENCY OF THE SOUTH SUMATERA PROVINCE GOVERNMENT)*

Karya tulis ilmiah berupa tesis, Juli 2024


Arwin Novansyah; dibimbing oleh Dr. Raniasa Putra, S.IP, M.Si dan Dr. Andries Lionardo, M.Si,

113 halaman, tabel, gambar, lampiran,

*This study aims to examine the Implementation of Security and Order of Regional Property based on Regional Regulation Number 2 of 2018 (study at the Regional Financial and Asset Management Agency of the South Sumatra Provincial Government). The theory used is the Implementation model of Donal van Meter and Carl van Horn's policy which consists of six variables; Policy Standards and Objectives, Resources, Characteristics of the Implementing Organization, Disposition or Attitude of the Implementers, Inter-Organizational Communication, Social, Economic and Political Environment. The research method used is a qualitative descriptive method. Data were obtained through interviews, observations and documentation studies. The results of the study analyzed with the framework of thinking from Donal van Meter and Carl van Horn showed that the support of basic operational facilities and infrastructure had been met, in addition to support from law enforcement officers in implementing the security and order of Regional Property. On the other hand, several obstacles that arise in the implementation of the policy of Securing and Controlling Regional Property are influenced by many factors, budget support that is not yet optimal, weak proof of ownership as a result of weak administration and documentation systems, lack of sense of responsibility from some heads of Regional Apparatus Organizations towards the management of Regional Property, as well as the still minimal awareness of the community and former officials who use goods who still want to use Regional Property that is not in accordance with applicable regulations, thus creating obstacles in the implementation of Securing and Controlling Regional Property.*

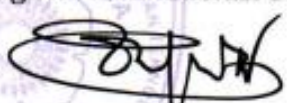
Menyetujui,

  
**Dr. Raniasa Putra, S.IP, M.Si**  
Pembimbing Pertama

  
**Dr. Andries Lionardo, M.Si**  
Pembimbing Kedua

Mengetahui,

**Koordinator Program Studi  
Magister Administrasi Publik**

  
**Dr. Raniasa Putra, S.IP, M.Si**  
197605122012 12 1 003

## RINGKASAN

IMPLEMENTASI PENGAMANAN DAN PENERTIBAN BARANG MILIK DAERAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018 (STUDI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN)

Karya tulis ilmiah berupa tesis, Juli 2024

Arwin Novansyah; dibimbing oleh Dr.Raniasa Putra, S.Ip, M.Si dan Dr. Andries Leonardo, M.Si,

113 halaman, tabel, gambar, lampiran,

Barang Milik Daerah memiliki fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan tetapi dalam pelaksanaan pengelolaannya sarat dengan dinamika dan permasalahan/konflik. Terdapat beberapa contoh empiris permasalahan yang ditemukan dilapangan terkait persoalan Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara umum adalah : masih banyaknya Barang Milik Daerah yang bersengketa dengan pihak lain, penggunaan/pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak sesuai dengan aturan baik oleh Aparatur Sipil Negara, mantan pejabat maupun masyarakat umum, masih terdapat Barang Milik Daerah yang belum diketahui keberadaannya dan masih banyaknya Barang Milik Daerah yang terbenkakai sehingga menurunkan nilai dari Barang Milik Daerah itu sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti Implementasi Pengamanan dan Penertiban Barang Milik Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 (studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan). Teori yang digunakan adalah model Implementasi kebijakan Donal van Meter dan Carl van Horn yang terdiri dari enam variabel ; Standar dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Organisasi Pelaksana, Disposisi atau Sikap Para Pelaksana, Komunikasi Antar Organisasi, Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik. Metode penelitian yang digunakan ialah metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian yang dianalisis dengan kerangka berfikir dari teori Donal van Meter dan Carl van Horn menunjukkan bahwa dukungan sarana dan prasarana dasar operasional sudah terpenuhi, selain itu juga mendapat dukungan dari aparaturnya penegak hukum dalam pelaksanaan pengaman dan penertiban Barang Milik Daerah. Disisi lain terdapat beberapa hambatan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan Pengamanan dan Penertiban Barang Milik Daerah yang disebabkan oleh beberapa faktor, dukungan anggaran yang belum maksimal, lemahnya bukti kepemilikan sebagai akibat dari lemahnya sistem pengadministrasian dan dokumentasi, kurangnya rasa tanggung jawab dari sebagian kepala Organisasi Perangkat Daerah, Badan da Biro terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah, serta masih minimnya kesadaran masyarakat dan oknum mantan pejabat pengguna barang yang masih ingin menggunakan Barang Milik Daerah yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehinga menjadikan hambatan dalam implementasi Pengamanan dan Penertiban Barang Milik Daerah.

Kata Kunci : Implementasi, Pengamanan, Penertiban Barang Milik Daerah, kepustakaan

## SUMMARY

### *IMPLEMENTATION OF SECURITY AND REGIONAL PROPERTY REGULATION BASED ON REGIONAL REGULATION NUMBER 2 OF 2018 (A STUDY ON THE REGIONAL FINANCIAL AND ASSET MANAGEMENT AGENCY OF THE SOUTH SUMATERA PROVINCE GOVERNMENT)*

Karya tulis ilmiah berupa tesis, Juli 2024

Arwin Novansyah; dibimbing oleh Dr.Raniasa Putra, S.Ip, M.Si dan Dr. Andries Leonardo, M.Si,

113 halaman, tabel, gambar, lampiran,

*Regional assets play a highly strategic role in government administration; however, their management is fraught with dynamics and issues/conflicts. Several empirical problems related to regional assets within the South Sumatera Provincial Government include the following: numerous disputes over regional assets with third parties, misuse or inappropriate utilization of regional assets by civil servants, former officials, and the general public, unidentified regional assets, and neglected assets, which ultimately diminish their value.*

*This study aims to examine the implementation of safeguarding and regulation of regional assets based on Regional Regulation Number 2 of 2018, focusing on the Regional Financial and Asset Management Agency of the South Sumatera Provincial Government. The theoretical framework used is the policy implementation model by Donald Van Meter and Carl Van Horn, which comprises six variables: policy standards and objectives, resources, characteristics of implementing organizations, disposition or attitudes of implementers, inter-organizational communication, and the social, economic, and political environment. The research employs a qualitative descriptive method, with data collected through interviews, observations, and document reviews.*

*The research findings, analyzed using Van Meter and Van Horn's theoretical framework, reveal that basic operational facilities and infrastructure are adequately supported, along with assistance from law enforcement agencies in implementing the safeguarding and regulation of regional assets. However, several obstacles hinder the implementation of these policies. These include insufficient budgetary support, weak ownership evidence due to inadequate administrative and documentation systems, a lack of responsibility among some heads of regional organizations, agencies, and bureaus in managing regional assets, and limited awareness among the public and former officials who continue to use regional assets in violation of applicable regulations. These challenges impede the effective implementation of safeguarding and regulating regional assets.*

*Keywords: Implementation, Safeguarding, Regulation of Regional Assets, Literature Review*

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TESIS.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>x</b>
<b>RINGKASAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>SUMMARY.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
2.1. Kebijakan Publik.....	7
2.2. Implementasi Kebijakan .....	10
2.3. Model – Model Implementasi.....	12
2.4. Pengelolaan Aset Daerah .....	20
2.5. Penelitian Terdahulu.....	22
2.6. Kerangka Pemikiran .....	27
2.7. Teori Yang Digunakan dalam Penelitian ini.....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>

3.1. Jenis Penelitian.....	34
3.2. Fokus Penelitian .....	34
3.3. Sumber Data .....	35
3.4. Informan .....	36
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.6. Teknik Analisis Data .....	39
3.7. Pengecekan Keabsahan Data .....	42
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
4.1. Hasil.....	44
4.1.1 Gambaran Umum Pemerintahan di Provinsi Sumatera Selatan.....	44
4.1.2 Jumlah dan Nilai Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.....	48
4.1.3 Gambaran Umum BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.....	51
4.1.4 Jumlah dan Nilai Aset BPKAD Provinsi Sumsel.....	58
4.1.5 Gambaran Umum Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan .....	61
4.2. Bagaimanakah IMPLEMENTASI PENGAMANAN DAN PENERTIBAN BARANG MILIK DAERAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Dalam Upaya Pengamanan Dan Penertiban Barang Milik Daerah Oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.....	64
4.2.1 Pengamanan Barang Milik Daerah.....	64
4.2.2 Penertiban Barang Milik Daerah.....	72
4.2.3 Aset yang Tidak Terkelola.....	79
4.3. Pembahasan.....	90
4.3.1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam Upaya Pengamanan dan Penertiban Barang Milik Daerah .....	90
1. Analisis Standar dan Tujuan Kebijakan.....	90
2. Analisis Sumber Daya.....	91
3. Analisis Karakteristik Organisasi Pelaksana.....	94
4. Analisis Disposisi atau Sikap Para Pelaksana .....	98

5. Analisis Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-kegiatan Pelaksanaan.....	99
6. Analisis Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik.....	100
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>104</b>
5.1. Kesimpulan .....	104
5.2. Saran .....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>107</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>109</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.</b> Kerangka Berpikir Penelitian.....	29
<b>Gambar 2.</b> Analisis data kualitatif.....	42
<b>Gambar 3.</b> Struktural Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan .....	52
<b>Gambar 4.</b> Rekapitulasi Barang ke Neraca (31 Desember 2021) .....	60
<b>Gambar 5.</b> Wawancara bersama Bapak Lamuda Marbun, SE, M.Si Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Kepala Sub bidang Penatakelolaan Barang Milik Daerah Bapak Dante Rama Surya,SE Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.....	77
<b>Gambar 6.</b> Wawancara bersama Bapak Aris Saputra,S.Sos, M.Si Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (7 Februari 2023).....	78
<b>Gambar 7.</b> Wawancara bersama Bapak Drs.H.Edwar Chandra,M.H. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. ....	79
<b>Gambar 8.</b> Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang Terkait Aset Sengketa.....	80
<b>Gambar 9.</b> Aset Sengketa Tanah Kosong .....	81
<b>Gambar 10.</b> Putusan PTUN Terkait Sengketa Aset.....	82
<b>Gambar 11.</b> Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang Terkait Aset Terbengkalai .....	83
<b>Gambar 12.</b> Aset Terbengkalai .....	83
<b>Gambar 13.</b> Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang Terkait Aset yang dikuasai Masyarakat.....	84
<b>Gambar 14.</b> Aset yang dikuasai oleh Masyarakat.....	85
<b>Gambar 15.</b> Wawancara Bapak Robert Sibarani Penghuni Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan .....	88
<b>Gambar 16.</b> Wawancara Ibu Ewik, Penghuni Aset Pemerintah Provinsi Sumsel .....	88
<b>Gambar 17.</b> Wawancara Bapak Koko Karnain Penghuni Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan .....	89
<b>Gambar 18.</b> Daftar Aset Kendaraan Bermotor .....	95
<b>Gambar 19.</b> Wawancara dengan Bpk Abu Naim, S.IP,M,Si, Kasubag Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah PemerintahProvinsi Sumsel .....	93
<b>Gambar 20.</b> Wawancara dengan Bapak Sandy Fahlevi .....	93
<b>Gambar 21.</b> Struktur Birokrasi .....	99



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.</b> Aset yang dikelola Provinsi Sumatera Selatan 2021 .....	3
<b>Tabel 2.</b> Matriks Penelitian Terdahulu .....	27
<b>Tabel 3.</b> Fokus Penelitian .....	40
<b>Tabel 4.</b> Jumlah dan Nilai Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 2021 .....	54
<b>Tabel 5.</b> Temuan Aspek Standar dan Sasaran dalam Implementasi Kebijakan .....	95
<b>Tabel 6.</b> Temuan Aspek Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan .....	98
<b>Tabel 7.</b> Aktor Kebijakan .....	99
<b>Tabel 8.</b> Temuan Aspek Karakteristik Organisasi dalam Implementasi Kebijakan .....	101
<b>Tabel 9.</b> Temuan Aspek Disposisi Implementasi Kebijakan .....	103
<b>Tabel 10.</b> Temuan Aspek Komunikasi Antar Organisasi dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah .....	104
<b>Tabel 11.</b> Temuan Aspek Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah .....	105
<b>Tabel 12.</b> Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan .....	104

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1.</b> Surat Undangan Ujian Tesis.....	110
<b>Lampiran 2.</b> SK Ujian Tesis.....	111
<b>Lampiran 3.</b> SK Yudisium.....	112

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Barang Milik Daerah (BMD) atau Aset merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Barang Milik Daerah merupakan sarana utama yang dimiliki daerah guna menunjang operasional jalannya pemerintahan daerah, dengan adanya Barang Milik Daerah maka program pembangunan daerah dapat terlaksana. Oleh karena itu, Barang Milik Daerah harus dikelola dengan baik dan benar sehingga terwujud Pengelolaan Barang Milik Daerah yang bermuara pada tercapainya kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.

Pengelolaan Barang Milik Daerah/Aset harus ditangani dengan baik agar Aset tersebut selain dapat menjadi sarana pembangunan juga menjadi modal bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya. Namun jika tidak dikelola dengan semestinya, Aset tersebut justru menjadi beban biaya karena sebagian dari Aset membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan dan juga turun nilainya (terdepresiasi) seiring waktu.

Dalam pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan disebutkan bahwa :

*Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meliputi :*

- 1. Barang Milik Pemerintah Provinsi yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau*
- 2. Barang Milik Pemerintah Provinsi yang berasal dari perolehan lainnya yang sah*

Dijelaskan lebih lanjut yang dimaksud dengan perolehan lainnya yang sah disebutkan dalam pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 sbb :

*Barang Milik Pemerintah Provinsi yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi :*

1. *Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;*
2. *Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;*
3. *Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;*
4. *Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau*
5. *Barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal Pemerintah Daerah.*

Dari penjelasan pasal tersebut diatas, terdapat banyak sumber perolehan Barang Milik Daerah oleh Pemerintah Daerah, ini disatu sisi adalah sebuah ruang yang luas dalam perolehan Barang Milik Daerah akan tetapi berpotensi menimbulkan persoalan yang cukup kompleks dalam pengelolaan Barang Milik Daerah jika tidak dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dalam pelaksanaannya pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi banyak sekali variabel-variabel yang satu sama lain saling berkaitan, masing-masing mempunyai tantangan dan kendala tersendiri. Dalam pasal 1 angka 26 ketentuan umum Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan disebutkan bahwa :

*“Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian”.*

Dengan demikian pengelolaan Barang Milik Daerah tidak hanya meliputi pengertian harfiah bahwa pengelolaan hanya *“mengelola”* Barang Milik Daerah yang sudah ada, akan tetapi pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi tanggung jawab perencanaan, pengawasan hingga penertiban dan pengamanan Barang Milik Daerah, yang semua tahapan-tahapan itu saling berkaitan dan berdampak satu sama lain.

Provinsi Sumatera Selatan secara administratif terdiri dari 13 (tiga belas) Pemerintah Kabupaten dan 4 (empat) Pemerintah Kota, beserta perangkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masing-masing. Dalam menjalankan sistem pemerintahan di dukung oleh 49

Perangkat Daerah dan **90** Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan. Saat ini nilai Aset yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera hingga Tahun 2023 adalah Rp.36.352.051.385.164,30 (Tiga Puluh Enam Triliun Tiga Ratus Lima Puluh Dua Miliar, Lima Puluh Satu Juta, Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu, Seratus Enam Puluh Empat Rupiah) audited, yang terdiri dari :

**Tabel 1.** Aset yang dikelola Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 2023

<b>KIB</b>	<b>Jumlah dalam persil</b>	<b>Total Harga</b>
Tanah	2.305	Rp. 12.289.958.443.436,90
Peralatan Mesin	358.656	Rp. 3.635.251.294.429,26
Gedung Bangunan	5.917	Rp. 5.203.730.797.305,23
Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.074	Rp. 14.357.391.556.472,60
Aset Tetap Lainnya (buku, hewan ternak, dll)	1.058.284	Rp. 768.736.313.192,01
Konstruksi dalam Pekerjaan	8	Rp. 96.982.980.328,22
<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 36.352.051.385.164,30</b>

(Sumber data : BPKAD Pemprop Sumsel 2023 audited)

Dengan jumlah dan nilai Aset yang demikian besar, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dituntut mampu melakukan bukan hanya sebatas pemanfaatan, baik secara internal untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, dan secara eksternal dengan pendayagunaan Aset melalui kerjasama pemanfaatan sehingga bermanfaat secara ekonomi bagi masyarakat dan menambah masukan Pendapatan Asli Daerah, tetapi juga Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dituntut mampu melakukan pengendalian terhadap Aset yang dikelola dengan melakukan pengamanan dan penertiban jika terjadi pelanggaran/penyalahgunaan pemanfaatan Aset tersebut.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah tersebut dilakukan melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ini dilaksanakan oleh 1 (satu) bidang yaitu Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mencakup keseluruhan kegiatan pengelolaan Barang Milik Daerah mulai dari perencanaan, penggunaan,

pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, inventarisasi, pembinaan /pengawasan/ pengendalian hingga pelaporan.

Barang Milik Daerah memiliki fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan tetapi dalam pelaksanaan pengelolaannya sarat dengan dinamika dan permasalahan/konflik. Terdapat beberapa contoh empiris permasalahan yang ditemukan dilapangan terkait persoalan Aset di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara umum adalah:

1. Masih banyaknya Aset yang bersengketa dengan pihak lain.

Terdapat banyak Aset-Aset milik Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan yang sampai saat ini masih bersengketa dengan pihak lain, hal ini dapat kita lihat dari banyaknya surat yang dilayangkan oleh pihak-pihak / masyarakat kepada Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, baik yang disampaikan dengan upaya untuk klarifikasi maupun dalam upaya hukum yang lebih lanjut dengan melayangkan gugatan kepada Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan melalui Pengadilan.

2. Penggunaan/pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak sesuai dengan kriteria/aturan baik oleh Aparatur Sipil Negara dan oleh masyarakat umum.

Terdapat beberapa Aset-Aset milik Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan yang masih sering digunakan oleh Aparatur Sipil Negara dan masyarakat umum tidak sesuai dengan kriteria / aturan yang ada, sebagai contoh penggunaan kendaraan Dinas oleh ASN yang tidak pada tempatnya, penggunaan kendaraan Dinas yang berbeda pencatatannya dengan Dinas yang bersangkutan bertugas, sehingga menimbulkan persoalan dikemudian hari. Sedangkan bagi masyarakat umum masih banyak yang menggunakan/memanfaatkan Aset milik Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan secara melawan hukum, dimana yang bersangkutan tidak mempunyai hak sama sekali menempati / menggunakan Aset milik Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan namun yang bersangkutan tetap bertahan menggunakan Aset tersebut

3. Masih terdapat Aset yang belum diketahui keberadaannya

Masih banyak Aset / Barang Milik Daerah yang belum diketahui keberadaannya khususnya kendaraan Dinas yang seharusnya digunakan untuk pelayanan publik justru tidak tercatat dengan baik, mengakibatkan hilangnya jejak administratif dan potensi penyalahgunaan, kendaraan-kendaraan ini sering kali berada di tangan pihak yang tidak berwenang atau bahkan hilang tanpa jejak, menyebabkan kerugian besar bagi anggaran negara.

4. Masih banyaknya Aset yang terbengkalai sehingga menurunkan nilai dari Aset tersebut. Dari hasil pengamatan peneliti terdapat begitu banyak Aset-Aset milik Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan yang terbengkalai.

Dari beberapa contoh persoalan Aset tersebut diatas sebagian sudah dapat terselesaikan, namun masih terdapat persoalan-persoalan yang belum dapat terselesaikan, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 terkait dengan penertiban dan pengamanan Aset / Barang Milik Daerah yang bersinggungan dengan masyarakat yang masih menjadi persoalan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Implementasi Pengamanan Dan Penertiban Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya pengamanan dan penertiban Barang Milik Daerah oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat Implementasi Pengamanan Dan Penertiban Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya pengamanan dan penertiban Barang Milik Daerah oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Mengacu pada perumusan masalah yang ada diatas, maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimanakah Implementasi Pengamanan Dan Penertiban Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya pengamanan dan penertiban Barang Milik Daerah oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat apa saja dalam Implementasi Pengamanan Dan Penertiban Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya pengamanan dan penertiban Barang Milik Daerah oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat penelitian secara akademis juga praktis sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan menjadi nilai tambah bagi kemajuan ilmu pengetahuan dalam bidang kajian ilmu administrasi publik khususnya dalam bidang kebijakan publik sebagai bahan literatur baru mengenai pengamanan dan penertiban Barang Milik Daerah oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

##### **2. Manfaat Praktis**

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka diharapkan bahwa hasil dari penelitian dapat bermanfaat yaitu:

- a. Bagi pemerintah, diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi terhadap Implementasi Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan Barang Milik Daerah, khususnya dalam pelaksanaan pengamanan dan penertiban Barang Milik Daerah
- b. Bagi masyarakat, dapat menjadi bahan pengetahuan dan informasi terkait kedudukan dan aturan hukum mengenai pemanfaatan Barang Milik Daerah



## DAFTAR PUSTAKA

- Afdaluddin, A. (2021). *ANALISIS PENGELOLAAN DAN PELAPORAN ASET SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SULAWESI BARAT* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS HASANUDDIN).
- Agustino, L. (2006). *Politik & kebijakan publik*. AIPI Bandung.
- Amry S, S. (2014). Implementasi Kebijakan Manajemen Aset Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Medan.
- Anderson, e. a. (2011). *A Theory of Quality Management Underlying The Deming Management Method*, Academy of Management. Vol. 19, 39 halaman.
- Anderson, K. M. (2019). *Public policy: Politics, analysis, and alternatives*. Cq Press.
- Chen, A. H. (2002). *Vergence and accommodation system in Malay primary school children*. The Malaysian journal of medical sciences: MJMS, 9(1), 9.
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design Fifth Edition: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approches*. SAGE Publications
- Daulay, C. F. (2019). *Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- EDWARD III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Fajri, A., Djalaluddin, A., & Siswanto, S. (2018). *Pengelolaan Aset tanah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Malang perspektif Ekonomi Islam*. Islamic Economics Quotient: Journal of Economics & Business Sharia, 1(2).
- Feiock, R. C. (2014). *Governing local sustainability: Agency venues and business group access*. Urban Affairs Review, 50(2), 157-179.

- Gulick, L. &. (2004). *Papers on the Science of Administration*. Routledge.
- Harahap, S. S. (2010). *Akuntansi Perbankan Syariah*. LPFE Usakti.
- J. Moleong, L. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdaya Karya.
- Kikeri, S. &. (2005). *Privatization: trends and recent developments*.
- Lasswel, H. D. (1936). *Politics: Who Gets What When and How.*, Nova York: Whitlesey House.
- Nuryanto, H. D. (n.d.). *Pentingnya Audit dan Standardisasi E-Procurement*, Harian Pikiran Rakyat, Kamis. 5.
- Permendagri. (2016). *Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Indonesia: Kementrian Dalam Negeri.
- Sasriawan, S. (2021). *STRATEGI PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU PROVINSI SULAWESI BARAT* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS HASANUDDIN).
- Stange, D. E. (2013). *Differentiated Troy Cells Act As Reserve Stem Cells To Generate All Lineages Of the Stomach Epithelium.* , 155(2), 357-368.
- Terry, G. R. (1968). *Principles of Management*. Homewood, Illinois: Richard D. Irwin, 19, 72.
- Van Meter, D. S. (1975). *The policy implementation process: A conceptual framework*. *Administration & Society*, 6(4), 445-488.